

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)
- Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012).
- Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi Hamzah dan RM Surachman, Pre-trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003).
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
- Moehar, Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility), (Bandung: PT Alumni, 2015).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2010).

- Mulyana, Asep, Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).
- Nelson, Febby Mutiara, Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Prasetyo Rudi, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang: 23-24 November 1989).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sjahdeini, Sutan Remy, Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, (Depok: Kencana, 2017).
- Soedarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Soedarto, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- _____, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Suhariyanto, Budi, dkk, Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018).

Yahya, Bettina, dkk, Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017).

_____, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Dengan Pelaku Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Crime and Court Act 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan lainnya dan Konvensi

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption 2003

Jurnal dan artikel

- Desimadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Desember 2019.
- Erna, Bernadeta Maria, “Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Oktober 2013
- Ferdian, Ardi, “Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol.14. No. 3, Desember 2021.
- Hidayat, Ahmad Arif, Nyoman Serikat PJ, Sukinta, “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana”, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Agustus 2017.
- Lutfia, Eka dan Pudji Astuti, “Deferred Prosecution Agreement Sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum”, Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol.9. No.3., Juli 2021.
- Muladi, “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Nelson, Febby Mutiara, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan *Deferred Prosecution Agreement*?”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Pidana, 2019.

Prameswari, Anindytha Arsa, dkk, “*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusahaan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12, Desember 2021.

Pujiyono dan Rahmi Dwi S, “Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Pembaharuan Hukum Pidana, Agustus 2019.

Ramadhan, Choky Risda, dkk, “Konsep dan Penerapan Plea Bargain di Beberapa Negara”, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol.3., Juli-Desember 2015.

Salinah, “Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam”, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa, November 2017.

Saputra, Rony, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cita Hukum, Vol.III., No. 2., Desember 2015.

Wibowo, Ribut Hari, “Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Oktober 2021.

Laporan

Yahya, Bettina, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Laporan Penelitian, (Jakarta, 2016).

Surat kabar

Indonesia Corruption Watch, “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021”, Databoks, 12 September 2021.

Laraspati, Angga, “Bamsoet Sebut 40% APBN/APBD Menguap oleh Korupsi.”

DetikNews, 9 Desember 2021, halaman 1.

Yuntho, Emerson, “Menjerat Korupsi Korporasi.” Kompas, 3 Maret 2017, halaman VII.

Rahayu, Lisye Sri, “Survei TII: 82% Perusahaan Swasta Ngaku Rugi Akibat Suap”,

DetikNews, 3 Juli 2019, halaman 1.

Kumalasanti, Susana Rita, “ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan”, (Kompas, 22 Mei 2022).

Website/Internet

“*Deferred Prosecution Agreement*”, <https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/guidance-for-corporates/deferred-prosecution-agreements/>, diakses pada 6 November 2022.

“*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*”, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf>, diakses pada 3 Januari 2022.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Abdillah, Mohammad, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma RI Nomor 13 Tahun 2016*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

Manuain, Orpa Ganefo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005).